

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIBOLEHKANNYA
MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENCALONKAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh

Nama : Hatovan Adelius

NIM : 1540050020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2019

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PESERTA UJIAN

Nama : Hatovan Adelius
NIM : 1540050020

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIBOLEHKANNYA MANTAN TERPIDANA
KORUPSI MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**

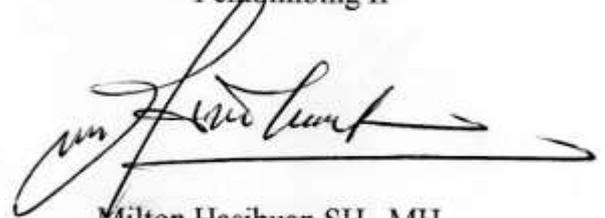
Disetujui,

Pembimbing I



Poltak Siringo-ringo SH., MH

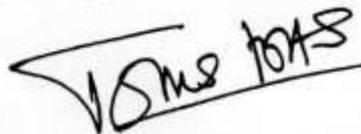
Pembimbing II



Milton Hasibuan SH., MH

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Tata Negara



Tomson Situmeang S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIBOLEHKANNYA MANTAN
TERPIDANA KORUPSI MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
LEGISLATIF

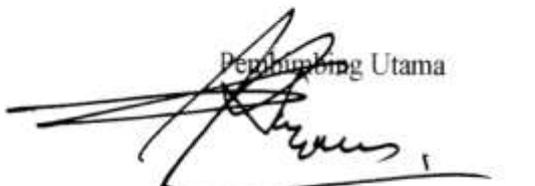
SKRIPSI

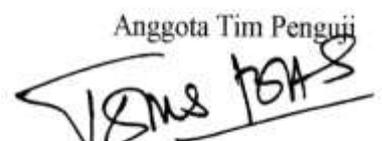
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh
Nama : Hatovan Adelius
NIM : 1540050020

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal Februari 2019 dan dinyatakan telah
lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Poltak Siringo-ringo S.H.M.H

Anggota Tim Penguji

Tomson Situmeang. S.H.M.H

Pembimbing Pendamping

Dr. Manotar Tampubolon, S.H.M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan hukum tentang kebolehan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, penulis menulis skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Kebolehan Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/HUM/2018)**”. Penulisan hukum ini untuk memenuhi dan melengkapai persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, karena manusia tak luput dari kesalahan. Maka penulis berharap semoga penulisan hukum yang telah saya buat bermanfaat bagi semua pihak serta penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

(**Hatovan Adelius**)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bugi Tuhan Yesus Kristus Yang Agung dan Mulia penulis paniatkan. Berkat kasih-Nya dan penyerlaan-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam perkuliahan

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah bijaksana didalam memimpin Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan proses studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam masa kepemimpinannya
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan proses studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam masa kepemimpinannya
4. Bapak Poltak Siringo-ringo, SH., MH selaku Ketua Program Studi (Kaprod) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

5. Bapak Milton Hasibuan SH., MH selaku dosen pembimbing II penulisan skripsi ini yang telah membantu memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu ditengah kesibukannya
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan membimbing serta mendukung penulis dalam perkuliahan. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapat. trimakasih
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dalam perihal pengadministrasian tentang skripsi ini
8. Terima Kasih saya ucapkan kepada kedua Orang Tua saya Drs. Binsar Marpaung dan Dra. Nurita Purba MPM atas doa, dukungan, nasehat, kesabaran dan kasih sayang saya tidak mungkin bisa menjadi seperti ini. Terima kasih banyak atas jasa-jasa kalian berdua selama ini di dalam hidup saya. Semoga Tuhan Yesus melindungi, menyertai dan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus Memberkati
9. Terima kasih kepada abang saya Hatorangan Brelin Marpaung SH atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya selama ini, Terimakasih bang Tuhan Yesus Memberkati
10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Marpaung, Bapakua dan Inang Tua, Amangboru dan Namboru atas doa , dukungan, nasehat yang telah diberikan kepada saya selama saya melakukan penulisan ini. Tuhan Yesus Memberkati.

11. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Purba Pakpak, Tulang dan Nantulan, Panggi dan Inangangi atas dukungan, doa , dan nasehat kepada saya selama saya melakukan proses penulisan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati
12. Terima kasih kepada teman-teman penulis Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sukses selalu.

Penulis

Hatovan Adelius

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Hatovan Adelius
 B. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.500.20
 C. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Diboolehkannya
 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif
 D. Kata Kunci : Terpidana Korupsi Boleh Mencalonkan Diri,
 Mantan
 E. Ringkasan Isi :

Saat ini sedang maraknya perdebatan antara PKPU dengan peraturan Perundang-undangan. PKPU melarang mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual dan narkoba untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislative. Keselarasan antara peraturan yang ada saat ini menjadi kekeruhan didalam proses pemilihan umum. Sehingga perdebatan tersebut harus diputuskan oleh Mahkamah Agung

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang

Dengan demikian kita akan mengerti bahwa letak kedudukan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada peraturan KPU (asas lex spesialis derogat lex generalis)

- F. Daftar Acuan : Buku, Internet, Undang-Undang
 G. Dosen Pembimbing : 1. Poltak Siringo-ringo S.H., M.H
 2. Milton Hasibuan S.H., M.H

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

Hatovan Adelius

ABSTRACT

- A. Student Name : Hatovan Adelius
 B. Student Identification Number: 15,400,500.20
 C. Title : Juridical Review of the Allowance of a Former
 Corruption convict to Run as a Legislative Member
 D. Keywords : Convicted Corruption May Nominate, Former
 E. Summary of Content:

Currently the debate is raging between PKPU with legislation. PKPU banned former convicted of corruption, sexual crimes and drugs to nominate themselves as members of the legislature. The harmony between the existing regulations becomes a turbidity in the election process. So the debate must be decided by the Supreme Court.

The research method used in this study is to use a normative juridical approach, which is an approach that uses the positivist legis conception. Those who see the law are identical with written norms created and promulgated by the state institution or official

Thus we will understand that the position of the legislation is higher than the KPU regulations (the principle of *lex specialist derogat lex generalis*)

- F. Reference List : List: Books, Internet, Laws
 G. Advisor : 1. Poltak Siringo-ringo S.H., M.H
 2. Milton Hasibuan S.H., M.H

Jakarta, August 2019

Writer

Hatovan Adelius

DAFTAR ISI

VISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v-vii
ABSTRAK.....	viii-x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Metode penelitian.....	10
F. Kerangka teori dan konseptual.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Definisi Pemilu	23
2.2. Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	29
2.3. Pihak dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	35
2.3.1 Komisi Pemilihan Umum	35
2.3.2 Badan Pengawas Pemilu.....	38
2.3.3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	43
2.4. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	48

BAB III	HASIL PENELITIAN.....	53
3.1	Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	53
3.2.	Syarat dan ketentuan dalam pencalonan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia	68
3.3.	Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencalonan diri anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan	79
	Komisi Pemilihan Umum.....	79
	Badan Pengawas Pemilu.....	80
	Partai Politik Peserta Pemilu.....	81
3.4	Pengawasan dalam pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia	82
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA	89
4.1	Analisis Hukum Terhadap Legalitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.....	89
4.1.1.	UUD 1945 (menjelaskan tentang pasal dalam uud yang menyatakan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).	91
4.1.2	Undang-Undang.....	92
4.1.3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	102
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	1035
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		106